



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KESADARAN HUKUM *DRIVER* OJEK *ONLINE* DALAM BERLALU  
LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
( STUDI KASUS *GRAB BIKE* DI KECAMATAN TAMPAN )**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NURHIDAYAT SAPUTRA**  
11327104266

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KESADARAN HUKUM DRIVER OJEK ONLINE DALAM BERLALU  
LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
( STUDI KASUS GRAB BIKE DI KECAMATAN TAMPAN )**

*Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana hukum Strata Satu (S1)  
Fakultas syariah dan ilmu hukum*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**NURHIDAYAT SAPUTRA  
11327104266**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2020**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **"Kesadaran Hukum *Driver Ojek Online* Dalam Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus *grab bike* Di Kecamatan Tampan )"**.

yang ditulis oleh:

Nama : NURHIDAYAT SAPUTRA

NIM : 11327104266

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 JUNI 2020 M

Pembimbing Skripsi

**FIRDAUS, SH., MH.**  
NIK. 19661002 199403 1 002

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **KESADARAN HUKUM DRIVER OJEK ONLINE DALAM BERLALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ( STUDI KASUS GRAB BIKE DI KECAMATAN TAMPAN )**, yang ditulis oleh :

Nama : NURHIDAYAT SAPUTRA  
 NIM : 11327104266  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : senin, 29 juni 2020  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, MA**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, SH.,MH**

Penguji I  
**Nurhidayat, SH., MH**

Penguji II  
**Dr. Abu Samah,MH**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 196803 1 005

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN  
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURHIDAYAT SAPUTRA  
NIM : 11327104266  
Tempat/Tanggal Lahir : PERAWANG, 01 JULI 1993  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Kesadaran Hukum Driver Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus grab bike Di Kecamatan Tampan )"** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya oranglain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya oranglain maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 1 AGUSTUS 2020  
Yang Membuat Pernyataan

**NURHIDAYAT SAPUTRA**  
NIM. 11327104266

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Murhidayat Saputra :Kesadaran Hukum *Driver Ojek Online* Dalam Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus *Grab Bike* Di Kecamatan Tampan )**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya driver ojek online yang dalam berlalu lintas kurang memperhatikan keselamatan dalam berkendara. Faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan adalah kelalaian pengendara dalam mengemudikan kendaraannya. Seperti hal nya para *driver ojek online* yang harus selalu memantau ponselnya untuk menerima *orderan* ataupun memantau akses jalan ke tempat tujuan. Sehingga menjadikan kurangnya kesadaran akan dirinya sendiri serta keselamatan penumpang.

Rumusan masalah dalam hal ini adalah Bagaimana kesadaran hukum *driver ojek online* (Grabbike) dalam berlalu lintas di Kecamatan Tampan.Apa penyebab kurangnya kesadaran hukum *driver ojek online* (Grab) dalam berlalu lintas di kecamatan tampan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum *driver ojek online* (Grab bike) dalam berlalu lintas di kecamatan tampan.Untuk mengetahui apa penyebab kurangnya kesadaran hukum *driver ojek online* (Grabbike) di kecamatan tampan dalam berlalu lintas. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis,dan sifat penelitiannya yaitu analisis deskriptif. Sampel penelitian ini berjumlah 24 orang terdiri dari kepala unit lintas 1 orang,perssonil unit lintas 3 orang,dan driver ojek online grab bike 20 orang.teknik pengambilan sampel ini yaitu purposive sampling.teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi,angket,wawancara,dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah kesadaran hukum Ojek Online di Kecamatan Tampan masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum ini disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh *driver* Grab bike di kecamatan tampan ketika berkendara di jalan. Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh *driver* Grab kecamatan tampan yaitu seperti menerobos lampu merah, menggunakan ponsel ketika berkendara, tidak memberikan helm kepada penumpang.penyebab kurangnya kesadaran hukum driver ojek online (grab bike) di kecamatan tampan disebabkan karena faktor kurangnya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum dalam berlalu lintas.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas barokah yang selalu diberikan-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **KESADARAN HUKUM DRIVER OJEK ONLINE DALAM BERLALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS GRAB BIKE DI KECAMATAN TAMPAN)**". Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Sang Teladan yang membawa kita ke zaman yang penuh dengan kebaikan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam menempuh studi S1 untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya karya ini tidak terlepas dari bantuan dan doa, dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan doa kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis cintai, Bapak Nurmin dan Ibu Nurjas, yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a, kasih sayang keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti hentinya mengalir untuk penulis juga memberikan dukungan penulis baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada adik-adik penulis Eliza Kurniati Amin, Nuralil Fikri, Muhammad Fajri Ramadhan, dan Rahma Nuraini yang juga telah memberikan dukungan dan doa yang membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof . Dr. KH. ahmad mujahidin selaku rektor universitas islam negeri sultan syarif kasim riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Drs H.hajar ,M.Ag selaku dekan fakultas syariah dan hukum beserta jajaranya yang telah memberikan fasilitas kepada penullis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ketua jurusan ilm hukum bapak Firdaus SH,MH beserta sekretaris jurusan bapak Muslim,S.Ag.Sh.,M.Hum yang telah memberikan wawasan beserta fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Firdaus SH,MH Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Asril S,Hi,MH selaku pembimbing akademik yang telah memberikan wawasan dan arahan dalam melaksanakan perkuliahaan sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen yang telah mendidik penulis selama perkuliahan serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas bantuannya.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Kapolsek Tampan Bapak Ambarita yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian demi menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Kepala Unit Lalu Lintas Husnedi Husein SH beserta anggota satuan lalu lintas polsek tampan yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian demi menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman – teman jurusan ilmu hukum konsentrasi hukum tata negara 2013 yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Sukses untuk kita semua.
12. Kepada Siti Rahmah Astuti Amd, Farm yang selalu memberikan omelan dan juga arahan serta semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada seluruh skuad tim futsal Mustamindo Permai yang telah memberikan nasehat dan wawasan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada skuad memancing mustamindo permai yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu atas selesainya skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga dengan senang hati, penulis menerima segala kritik dan saran-saran yang sifatnya membangun dalam hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis

Nurhidayat Saputra

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II      TINJAUAN UMUM</b>	
A. Letak Geografis Kecamatan Tampan.....	14
B. Sejarah Berdirinya Polsek Tampan.....	15
C. Visi Dan Misi Polsek Tampan .....	17
D. Tugas Satuan Polsek Tampan .....	18
E. Struktur Organisasi Polsek Tampan.....	22
<b>BAB III      TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kesadaran Hukum	
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas .....	25
C. Pelanggaran Lalu Lintas.....	26
D. Pasal – Pasal Pelanggaran Lalu Lintas	
dan Kewajiban Pengguna Jalan.....	29
E. Peraturan Kebijakan ( <i>Beleidsregels</i> ) Dan Surat Edaran	
1. Peraturan kebijakan.....	34





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Urat edaran polri .....	35
F. Tinjauan Umum Tentang Ojek Online	
1. Ojek Online .....	40
2. Grab .....	41
G. Kepolisian Dan Unit Lantas	
1. Kepolisian .....	42
2. Unit Lantas .....	43

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Bagaimana Kesadaran Hukum <i>Driver</i> Ojek Online (grab bike) Dalam Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .....	46
B. Apa penyebab kurangnya Kesadaran Hukum <i>Driver</i> Ojek Online (grab bike) Dalam Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .....	54

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Populasi dan Sampel .....	10
Tanggapan Responden Tentang Menggunakan Handphone Saat Berkendara.....	50
Tanggapan Responden Tentang Menerobos Lampu Merah .....	51
Tanggapan Responden Tentang Tidak Meberikan Helm Kepada Penumpang .....	52

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Perkembangan teknologi dan informasi begitu cepat. Meratanya sistem layanan internet dan tingginya pengaruh *smart phone* membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang berpotensi bagi pengembangan aplikasi berbasis *online*. Salah satunya adalah di bidang angkutan umum. Pengguna sistem teknologi dan informasi yang menjadikan jasa angkutan lebih efisien untuk digunakan, yaitu dengan pemesanan secara *online* yang melalui *smart phone*. Salah satu jasa angkutan *online* yang saat ini berkembang adalah Grab.

Pembangunan ekonomi suatu kota membutuhkan jasa angkutan yang Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara. Kebutuhan jasa pengangkutan atau disebut juga transportasi merupakan kebutuhan turunan (*derived demand*) akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya, karena pada dasarnya transportasi merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat saat ini.<sup>1</sup> Setiap orang membutuhkan alat transportasi untuk menunjang berbagai macam kegiatan mereka seperti bekerja, sekolah, bepergian maupun aktivitas lainnya. Selain itu, sebagian dari mereka memanfaatkan transportasi sebagai sumber mata pencaharian untuk memenuhi

---

1 Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal 45



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan hidup. sebagai suatu sistem jaringan, transportasi memiliki dua peran utama yaitu: (1) sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di perkotaan; (2) sebagai prasarana bagi pergerakan manusia dan barang akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan.<sup>2</sup> Terkait hal tersebut Jasa angkutan *online* Grab memberikan layanan-layanan yang tidak di dapatkan pada jasa angkutan umum. Pelayanan yang diberikan angkutan *online* Grab adalah akses untuk mendapatkan pengemudi dengan mudah, pembayaran tunai maupun non tunai, perjalanan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi, serta potongan harga yang diberikan kepada penumpang di waktu-waktu tertentu, pelayanan tersebut tidak diterapkan oleh angkutan umum.<sup>3</sup>

Selain itu Transportasi *online* memberikan solusi alternatif di tengah padatnya kendaraan agar cepat dan bisa menjangkau tempat yang kemungkinan tidak bisa dijangkau oleh kendaraan umum lainnya. Sistem yang diterapkan pada transportasi berbasis *online* ini yaitu dengan mengangkut orang dan mendapatkan biaya yang telah tertera dalam aplikasi ojek *online*. Tidak hanya dapat melayani antar jemput orang, ojek *online* juga dapat mengantarkan barang dan makanan yang telah dipesan oleh para pengguna jasa aplikasi ojek *online* tersebut. Namun dengan Munculnya angkutan berbasis aplikasi *online* Grab telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Satu sisi angkutan *online* Grab dianggap mempermudah

<sup>2</sup> Tamin, O.Z, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, (Bandung: ITB, 1997) dikutip dalam Yane Hairunnisa dan Rini Rachmawati, "Kajian Penyediaan Dan Pemanfaatan Pelayanan Trasnportasi Publik Di Kota Bekasi" *Jurnal Bumi Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012, Universitas Gadjah Mada, hal 164

<sup>3</sup> Endang Wahyusetyawati, "Dilema Pengaturan Transportasi *Online*", *Jurnal Rechtsvinding Online*, 7 Mei 2017, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI, hal 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengemudi dan konsumennya. Di sisi lain, angkutan *online* Grab mendapatkan banyak kecaman dari pengemudi angkutan umum dan masyarakat umum karena sering kali driver ojek online yang tidak konsentrasi dalam mengendarai kendaraan bermotor dalam hal tersebut dikarenakan konsentrasinya terpecah karena mengamati *smartphone* nya, tentu hal ini sangat menghawatirkan keselamatan baik bagi driver itu sendiri maupun penumpang yang di bawanya.<sup>4</sup>

Terkait hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran driver akan pentingnya keselamatan dan kesadaran dalam menaati peraturan berlalu lintas yang terbilang masih sangat rendah. Hal itu dapat dilihat driver menjalankan kendaraannya dengan tidak memperhatikan aturan lalu lintas, seperti menerobos rambu lalu lintas hingga menggunakan *smartphone* saat berkendara. Hal tersebut merupakan salah satu faktor tingginya angka kecelakaan. Tingginya angka kecelakaan yang menimbulkan luka ringan, luka berat hingga kecelakaan yang memakan korban jiwa merupakan akibat yang ditimbulkan karena kurangnya kesadaran hukum pengemudi dalam berlalu lintas.<sup>5</sup>

Dalam hal ini, kesadaran hukum dalam berkendara merupakan salah satu bentuk permasalahan hukum dari kurangnya kesadaran. Lemahnya kesadaran driver terhadap peraturan lalu lintas terlihat dari rendahnya tingkat konsentrasi driver dalam berkendara, sehingga melahirkan budaya tidak disiplin pada

<sup>4</sup> Zulfatun Ni'mah, "Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar", (Sleman, Yogyakarta:Teras,2012), Cet. I, hal 123.

<sup>5</sup> Andi Zeinal Marala, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 5, Juli 2015, hal 129





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul yang diangkat adalah “Kesadaran Hukum *Driver Ojek Online* Dalam Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus grab bike Di Kecamatan Tampan ).

#### B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah<sup>8</sup>. adapun masalah yang diteliti adalah tentang Kesadaran Hukum *Driver Ojek Online* Dalam Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus (Grab bike) Di Kecamatan Tampan ).

#### C. Rumusan masalah

Berdasarkan dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada di latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesadaran Hukum *Driver Ojek Online* Dalam Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus (Grab bike) Di Kecamatan Tampan ) ?
2. Apa faktor penyebab kurangnya Kesadaran Hukum *Driver Ojek Online* Dalam Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta Universitas Indonesia Press, 1986 ), h, 122

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus (Grab bike)  
Di Kecamatan Tampan ) ?

#### D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Kesadaran Hukum *Driver Ojek Online* Dalam Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus (Grab bike) Di Kecamatan Tampan ).
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab kurangnya Kesadaran Hukum *Driver Ojek Online* Dalam Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus (Grab bike) Di Kecamatan Tampan ).

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademis khususnya dalam konsentrasi Hukum Tata Negara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai Kesadaran Hukum *Driver Ojek Online* Dalam Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus (Grab bike) Di Kecamatan Tampan ).

- c. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, yaitu untuk menambah pengetahuan peneliti.
- d. Hasil penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

#### E. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan penting dalam kegiatan penelitian. Oleh sebab itu, agar terlihat jelas bagaimana penelitian tersebut dilakukan, maka penulis uraikan unsur-unsur metode penelitiannya sebagai berikut:

##### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian Yuridis Sosiologis (empiris) yang terkait dengan pengaruh berlakunya hukum positif mengenai bagaimana Kesadaran Hukum *Driver Ojek Online* (Grab bike) dalam berlalu lintas di kecamatan tampan.

Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif, maksud dari deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan dalam hal ini tentunya akan memberikan gambaran mengenai mengenai bagaimana Kesadaran Hukum *Driver Ojek Online* (Grab bike) dalam berlalu lintas di kecamatan tampan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian sangat membantu untuk menentukan data yang akan diambil, sehingga lokasi sangat penting menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid<sup>9</sup>. Lokasi pada penelitian ini adalah di sekitar kecamatan tampan karena di kecamatan tampan saat ini terdapat cukup banyak *driver* ojek online. Dan menurut hasil observasi yang dilakukan, para *driver* ojek tersebut nampak sering melakukan pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti memilih kecamatan tampan sebagai lokasi penelitian pada penelitian ini.

## 3. Subjek dan objek penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Polsek Tampan Di Bagian Unit Lantas, *driver* ojek online (Grab), Peneliti memilih untuk melakukan penelitian kepada beberapa sumber tersebut karena di kecamatan tampan sendiri banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum pengguna jalan. Dengan melakukan penelitian terhadap beberapa sumber tersebut, diharapkan dapat membantu memudahkan peneliti untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada dengan berbagai sudut pandang.

Dan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah disekitar kecamatan tampan, karena di tempat tersebut masih banyak di jumpai *driver* ojek online grab yang melanggar aturan berlalu lintas.

---

9 Sumadi suryabrata, *metode penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2008) h 78

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4. Populasi Dan Sampel

Populasi (*universe*) adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama<sup>10</sup>.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala kanit lintas polsek tampan yang berjumlah 1 orang, personel unit lintas polsek tampan yang berjumlah 12 orang, driver ojek online grab di kecamatan tampan berjumlah sekitar 50 orang.

Sampel merupakan bagian dari populasi. sampel adalah suatu prosedur dimana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan menggunakan Metode *Purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Yang mana menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kepala kanit lintas polsek tampan yang berjumlah 1 orang, personel unit lintas polsek tampan yang berjumlah 3 orang, driver ojek *online* grab di kecamatan tampan berjumlah sekitar 20 orang.

Dalam rangka untuk mereduksi objek penelitian yang dimaksudkan untuk peneliti sebagian objek lalu menggeneralisasikan hasil penelitian yang bertujuan

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h. 95.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menarik kesimpulan-kesimpulan penelitian yang digeneralisasikan terhadap seluruh objek penelitian. Maka perlu penulis tetapkan populasi dan sampel pada penelitian ini seperti mana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Tabel Populasi dan Sampel**

No	Nama	Populasi	Sampel	Persentase
1	kanit lintas polsek tampan	1	1	100 %
2	personel unit lintas polsek tampan	12	3	25 %
3	Driver ojek online (grab bike) di kecamatan tampan	50	20	40 %

Sumber : kanit lintas polsek tampan dan driver ojek online grab di kecamatan tampan.

### 3. Data dan sumber data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.<sup>11</sup>

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dikelompokkan kedalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan merupakan bahan yang menjadi sumber utama yang digunakan dalam penelitian yang di peroleh dari driver ojek online (grab) di kecamatan tampan.

<sup>11</sup> Zainudin Ali , *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),hal. 98



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan serta literatur berkenaan dengan apa yang diteliti.
- c. Data Tersier yaitu bahan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan bahan hukum primer dan sekuder.Data ini dapat diperoleh dari kamus hukum,ensiklopedia hukum, surat kabar dan lain sebagainya.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a) Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran kondisi nyata yang diteliti.
- b) Wawancara yaitu melakukan komunikasi tanya jawab langsung dengan para pihak terkait selaku informan guna melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk penelitian.
- c) Angket yaitu melakukan komunikasi dengan para pihak terkait dengan memberikan selebaran yang berisikan pertanyaan pertanyaan guna untuk melengkapi data – data yang di butuhkan dalam penelitian.
- d) Studi kepustakaan yaitu melakukan penggalian data dari berbagai sumber literatur untuk melengkapi berbagai data pada penelitian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 5. Analisis data

Data-data yang terkumpul melalui observasi, anget / kuisioner dan wawancara dianalisis dengan Teknik analisis data deskriptif kualitatif<sup>12</sup> yaitu data-data tersebut dikelompokkan kedalam kategori tertentu berdasarkan persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian antara sekian data dengan data lain di hubungkan atau di bandingkan sehingga di peroleh gambaran yang utuh tentang masalah yang di teliti.

### F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab. tiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri. Akan tetapi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika ini adalah sebagai berikut<sup>13</sup>:

#### BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, selanjutnya akan di akhiri dengan sistematika penulisan.

#### BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini memuat menguraikan tentang Kesadaran Hukum *Driver* Ojek *Online* (Grab bike) Dalam Berlalu Lintas Berdasarkan

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet. Ke 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 77-78.

<sup>13</sup> Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011, h. 53

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus Di Kecamatan Tampan<sup>14</sup>).

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini memuat uraian tentang definisi kesadaran hukum, ojek *online*, dan definisi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat uraian tentang pemaparan tentang Kesadaran Hukum *Driver Ojek Online* (Grab) Dalam Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus Di Kecamatan Tampan ).

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat uraian tentang kesimpulan dan saran

**DAFTAR PUSTAKA**

<sup>14</sup> Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *metode penelitian ekonomi islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2014, h. 86



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Letak geografis kecamatan tampan

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah  $\pm 199.792 \text{ KM}^2$ .<sup>15</sup> Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu:

1. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
2. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
3. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
4. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Jadi dari 4 (empat) Desa inilah Kecamatan Tampan ini terbentuk yang berdasarkan PP No.19 Tahun 1987 yang diatas tadi.Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan PerdaNo.03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik kota pekanbaru, *pekanbaru dalam Angka 2019* (pekanbaru: BAPPEDA, 2008), hal.3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru)
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar).

Kecamatan Tampan pada saat ini adalah  $\pm 65$  KM2 yang terdiri dari 4 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Tuah Karya
2. Kelurahan Sidomulyo Barat
3. Kelurahan Delima
4. Kelurahan Simpang Baru

#### B. Sejarah berdirinya polsek tampan

Polsek Tampan berdiri pada tahun 1998 bertepatan di Jl. HR. Subrantas Kota Pekanbaru. Diresmikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Roesmanhadi, SH pada tanggal 02 November 1998, dan yang menjabat sebagai Kapolsek Tampan yang pertama adalah AKBP Drs. M. Natsir Achmad. Polsekta Tampan pada saat ini membawahi 6 Polsek antara lain:

1. Polsekta Pekanbaru Kota
2. Polsekta Senapelan
3. Polsekta Limapuluh
4. Polsekta Rumbai Pesisir
5. Polsekta Tampan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 6. Polsekta Bukit Raya

Pada tanggal 03 Desember 2003 sesuai dengan keputusan Kapolri No. Pol: KEP/90/XII/2003, Polsekta Tampan yang dijabat oleh AKBP Drs. Muhammad Iqbal dengan membawahi 3 Polsek Definitif dan 4 Polsek persiapan antara lain: Polsek Definitif terdiri dari :

1. Polsekta Pekanbaru Kota
2. Polsekta Senapelan
3. Polsekta Limapuluh

Polsek Persiapan terdiri dari :

1. Polsekta Pekanbaru Kota
2. Polsekta Sukajadi
3. Polsekta Tampan
4. Polsekta Bukit Raya

Pada tahun 2005 sesuai Skep Kapolda Riau No. Pol: SKEP/206/IX/2005 tanggal 24 september 2005, 4 Polsek Persiapan dalam jajaran Polsek Pekanbaru berubah menjadi Polsek Definitif. Pada saat itu Polres Pekanbaru membawahi 11 Polsek Definitif antara lain:

- 1) Polsekta Pekanbaru Kota
- 2) Polsekta Senapelan
- 3) Polsekta Limapuluh
- 4) Polsekta Rumbai Pesisir
- 5) Polsekta Tampan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Polsekta Bukit Raya
- 7) Polsekta Sukajadi
- 8) Polsekta Tenayan Raya
- 9) Polsekta SKP
- 10) Polsekta Rumbai
- 11) Polsek Payung Sekaki

#### C. Visi dan misi polsek tampan

visi dari polsek tampan adalah Mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima dan menjaga situasi KANTIBMAS yang kondusif dengan kepedulian tugas Preemptif, Preventif, Represif dan penegakan hukum secara proporsional dan professional serta aktualisasi Polmas dan Implementasi Quick Wins.

Sedangkan visi dari polsek tampan adalah :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui Quick Wins, mengurangi pengaduan masyarakat.
2. Meningkatkan kerjasama masyarakat, timbulkan partisipasi dan peranan masyarakat, melalui perpolisian masyarakat (POLMAS).
3. Meningkatkan keterampilan anggota agar profesional dalam pelaksanaan tugas. Meningkatkan kesejahteraan anggota, membangun kepedulian dan keikhlasan dalam tugas guna menciptakan situasi KANTIBMAS aman dan tertib.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Tugas Satuan Polsek Tampan

#### a. Polsek tampan

Tugas dari polsek yaitu :

1. Melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap ancaman kejahatan seperti kejahatan yang berdimensi baru, kejahatan yang menggunakan kekerasan, kejahatan pencurian dan semua jenis kejahatan yang dapat terdeteksi pihak kepolisian.
2. Melaksanakan kegiatan preventif guna menangkal gangguan keamanan masyarakat melalui kegiatan kemitraan antara polisi dan masyarakat.
3. Meningkatkan kegiatan preventif dalam hal mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran, memberikan rasa aman terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
4. Meningkatkan pencegahan represif dalam rangka penegakan hokum dan menindak tegas kepada setiap pelaku kejahatan.
5. Mempersiapkan sebuah tindakan apabila kejahatan meresahkan masyarakat dan mengancam keamanan lingkungan.
6. Mempersiapkan personil dan perlengkapan dalam melakukan patrol.
7. Melakukan pengamanan setiap ada kegiatan yang dilakukan masyarakat guna menghindari ancaman kejahatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Sabhara(Samapta Bhayangkara)**

Tugas dari satuan sabhara yaitu :

1. Pelaksanaan tugas Turjawali.
2. Penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa.
3. Pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring, pengamanan TPTKP.
4. Penjagaan dan pengamanan markas.

**c. Intelkam**

tugas dari bidang intelkam Unit Intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan informasi untuk keperluan deteksi dini(*early detection*) dan peringatan dini(*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan.

**d. Reskrim (Reserse Kriminal)**

tugas dari reskrim (reserse kriminal ) yaitu :

1. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

**e. Sium (Seksi Umum)**

Tugas dari sium (seksi umum) yaitu :

1. Perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antarlain kesekretariatian dan kearsipan di lingkungan Polsek.
2. Pelayanan administrasi personel dan sarpras.
3. Pelayanan markas antarlain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokol untuk upacara dan urusan dalam di lingkungan Polsek.
4. Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

**f. Provos**

Tugas dari provos yaitu :

1. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.
2. Penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek.
3. Pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri.

**g. unit lintas**

tugas dari unit lintas yaitu :

1. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerjasama lintas sektoral dan Dikmas lintas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltib car lant.
3. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

**h. binmas ( bina masyarakat )**

tugas dari binmas ( bina masyarakat ) yaitu :

1. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak- anak.
3. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.

**i. Sihumas (Seksi Hubungan Masyarakat)**

tugas dari sihumas ( seksi hubungan masyarakat ) yaitu :

1. Pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan Polsek.

#### E. Struktur Organisasi Polsek Tampan

Kepolisian Sektor (polsek), merupakan struktur kepolisian di tingkat kecamatan.<sup>16</sup> Struktur Polsek secara bertingkat terdiri atas:

1. KEPALA POLSEK TAMPAN: KOMPOL hotmartua ambarita
2. WAKA POLSEK TAMPAN: Acp Soekilat
3. KANIT PROVOST : IPDA AR. Pohan
4. KASIE UMUM : AIPTU I KETUT S.
5. KASIE HUKUM : AIPTU Masri
6. KASIE HUMAS: AIPTU Yurnalis
7. KANIT INTELKAM: AKP Nusirwan, SH
8. KANIT RESKRIM: IPTU Musa Jedi P.
9. KANIT BINMAS: AKP Arifin
10. KANIT SABHARA: AKP Syafrizal
11. KANIT LANTAS: IPTU Husnedi Husin
12. POLMAS

<sup>16</sup> Observasi ke kantor polisi kecamatan tampan pada tanggal 1 juni 2020 pukul 09.00 wib



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kesadaran Hukum

#### 1. Pengertian kesadaran hukum

Kesadaran hukum berasal dari kata sadar, yang berarti insyaf, merasa tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsyafi, merasai. Kesadaran berarti keinsyafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Jadi kesadaran adalah keinsyafan atau mengerti atau memahami segala sesuatu.<sup>17</sup>

Menurut para ahli ada beberapa macam pengertian dari kesadaran hukum, menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>18</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain

<sup>17</sup> Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang Widya Karya, 2009), hal 437

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta , Rajawali Pn.53.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Paul Scholten, kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.

Ahmad Sanusi, dalam batasan pengertian yang luas kesadaran hukum adalah potensi masyarakat yang harus membudaya dengan kaidah sehingga mengikat dan harus dipaksakan.

Widjaya mengemukakan bahwa kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras.<sup>19</sup> Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan.

Kesadaran hukum merupakan salah satu asas dari pada pembangunan nasional di Indonesia. Kesadaran hukum menjadi konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum.<sup>20</sup>

Hal ini menyebabkan, bahwa masalah kesadaran hukum harus mendapatkan penyorotan tersendiri, dengan maksud untuk dapat menjelaskan

<sup>19</sup> Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, (Jakarta : Era Swasta, 1984), hal 14

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 79.

aspek-aspek yang terkait dengannya. Kesadaran hukum merupakan faktor yang sangat penting di dalam proses berfungsinya sistem hukum secara menyeluruh.

## B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

Berbicara mengenai lalu lintas, maka istilah angkutan jalan pasti sering terangkai setelah kata lalu lintas tersebut. Kedua istilah tersebut memang sering serangkai penggunaannya terutama di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut : “Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas.<sup>21</sup> pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

”Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya dan angkutan jalan, prasarana

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Berbeda halnya dengan pengertian lalu lintas itu sendiri berdasarkan pasal 2 adalah sebagai berikut : “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.” Lalu lintas di dalam UU No. 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.<sup>22</sup>

Tata cara berlalu lintas di jalan dengan benar diatur dengan peraturan perundang-undangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas, dan pengendalian arus di persimpangan. Pengertian lalu lintas dalam UU No. 22 tahun 2009 sedikit lebih berbeda dibanding pengertian dalam UU No. 14 tahun 1992. UU No. 14 tahun 1992 menempatkan pengertian lalu lintas berada pada pasal 1 dan memasukkan hewan sebagai salah satu komponen dalam pasal tersebut.<sup>23</sup>

### C. Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi penyimpangan terhadap norma-norma yang ada. Penyimpangan tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk

<sup>22</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>23</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kejahatan atau pelanggaran yang berakibat pada dipidanya seseorang. Pelanggaran adalah suatu perbuatan seseorang yang melanggar norma-norma atau nilai-nilai yang menjadi aturan di dalam masyarakat. Seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran apabila melanggar atau tidak mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama berupa peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Perbuatan atau tindakan seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku apabila pada saat tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan telah ada aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut beserta sanksinya.

Secara sosiologis, pelanggaran merupakan perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berada dalam masyarakat ataupun negara yang telah dituangkan dalam sebuah aturan hukum. Penyebab dari pelanggaran bisa terjadi karena keterbatasan informasi ataupun akses akan aturan tersebut ataupun kurangnya penjelasan akan aturan hukum tersebut.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibmas. Lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan / atau barang yang

<sup>24</sup> Soekanto Soerjono, 1990. *Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Pengertian lalu lintas dalam Pasal 1 butir 2 ULLAJ merupakan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.<sup>25</sup>

Adapun peran lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dapat dibagi menjadi tiga yakni:

- 1) Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor seperti penggunaan helm bagi pengendara roda dua dan penggunaan sabuk keselamatan bagi pengendara roda empat dan sebagainya. Selain beberapa peralatan keselamatan tersebut, pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang berfungsi sebagai tanda legalitas pengemudi atas kepemilikan kendaraan.
- 2) Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara.

Pelanggaran yang sering terjadi terhadap tata cara berlalu lintas

---

<sup>25</sup>Op cit, hal 25

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu menjalankan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan pengemudi dan pengguna jalan lainnya.

- 3) Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Jalan merupakan fasilitas umum yang wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, fasilitas bagi pejalan kaki dan penyandang cacat, fasilitas bagi pengguna sepeda dan sebagainya. Pada umumnya pelanggaran yang sering dilakukan terhadap rambu lalu lintas yaitu menerobos lampu merah, parkir dan berhenti di sembarang tempat.

Berdasarkan beberapa kategori pelanggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor dalam mengemudikan kendaraannya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu sebagai warga negara yang taat pada hukum, sudah sewajarnya kita menaati peraturan-peraturan yang ada agar tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang dapat tercapai.<sup>26</sup>

#### D. Pasal-Pasal Pelanggaran Lalu Lintas dan Kewajiban Pengguna Jalan

Seperti yang telah di jelaskan diatas bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk mengatur keselamatan bagi pengguna jalan, tentunya di dalam

<sup>26</sup> Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Jaksa, Polisi Dan Pengacara*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm.35.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang ini ada beberapa pasal yang mengatur tentang kewajiban dan pelanggaran bagi pengguna jalan yang termasuk dalam jenis pelanggaran lalu lintas, sebagai berikut :

#### Pasal 57

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.
- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas:
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>27</sup>

#### Pasal 58

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>28</sup> Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pasal 68**

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

**Pasal 77**

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.<sup>29</sup>

**Pasal 105**

- (1) Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:
  - a. Berperilaku tertib;
  - b. dan/atau Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.<sup>30</sup>

**Pasal 106**

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.

<sup>29</sup> Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>30</sup> Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi aturan.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
  - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
  - b. Surat Izin Mengemudi;
  - c. bukti lulus uji berkala; dan/atau tanda bukti lain yang sah.<sup>31</sup>

### Pasal 107

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.<sup>32</sup>
- (2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

### Pasal 112

- (1) Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang

<sup>31</sup> Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>32</sup> Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.

- (2) Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat.
- (3) Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.<sup>33</sup>

#### Pasal 115

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:
  - a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
  - b. dan/atau berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

<sup>33</sup> Pasal 112 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Peraturan Kebijakan ( *Beleidsregels* ) Dan Surat Edaran

### 1. Peraturan Kebijakan ( *Beleidsregels* )

Peraturan kebijakan (*beleidsregels, spiegelsrecht, pseudowetgeving, olicy rules*) adalah ketentuan (*rules* bukan *law*) yang dibuat oleh pemerintah sebagai pejabat administrasi negara. Cabang-cabang pemerintahan yang lain tidak berwenang membuat peraturan kebijakan. Presiden sebagai kepala negara tidak dapat membuat peraturan kebijakan. Kewenangan Presiden membuat peraturan kebijakan adalah dalam kedudukan sebagai badan atau pejabat administrasi negara, bukan sebagai kepala negara.

Peraturan kebijakan bukan (tidak termasuk) salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan, meskipun dalam banyak hal tampak (menampakkan gejala) sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penggunaan istilah peraturan dalam arti *wetgeving* (peraturan perundang-undangan) sebenarnya kurang tepat. Kalaupun dipergunakan istilah peraturan bukan dalam padanan *wetgeving* atau *legislation*, tetapi sebagai padanan *regel* atau *rule*. Dalam kaitan penamaan tersebut, lebih tepat dinamakan *beleidsregel* daripada *pseudowetgeving*.<sup>34</sup>

Pada Bahasa Indonesia, istilah *regel* atau *rule* mungkin lebih tepat berpadanan dengan kata ketentuan dibandingkan peraturan atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keputusan administrasi negara sebagai *beleidsregel*

<sup>34</sup> Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dinamakan ketentuan kebijakan. Dengan memakai kata ketentuan akan nampak bedanya dengan peraturan yang dapat berarti sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, yakni peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

Pembuatan peraturan kebijakan diperlukan dalam rangka menjamin ketaatan-asasan (konsistensi) tindakan administrasi. Ketaat-asasan ini bukan hanya berlaku bagi tindakan yang bersumber atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, juga berlaku bagi tindakan-tindakan yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Kebutuhan akan ketaat-asasan ini berkaitan dengan azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), antara lain asas kesamaan (*gelijkheidsbeginsel*), asas kepastian hukum (*rechtszekerheidsbeginsel*) dan asas dapat dipercaya (*vertrowenbeginsel*).<sup>35</sup>

Dengan adanya peraturan kebijakan tersebut, maka akan terjamin ketaatan-asasan tindakan administrasi negara dan untuk setiap peristiwa yang mengandung persamaan, kepastian hukum, dan tindakan-tindakan dapat dipercaya karena didasarkan pada peraturan tertentu.

## 2. Surat Edaran Polri

KAPOLRI baru saja menerbitkan Surat Edaran tentang larangan penggunaan handphone saat berkendara. Surat edaran tersebut pada intinya menegaskan beberapa hal penting. Pertama, masih banyaknya pengendara

<sup>35</sup> Moh. Mahfud MD. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang menggunakan handphone saat berkendara sehingga membuat pengendara jadi tidak berkonsentrasi dalam berkendara sehingga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas cukup menjadi perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya pelanggaran dalam berlalu lintas .

Selanjutnya SE Kapolri tersebut menyatakan bahwa apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi meningkatnya pelanggaran dalam berlalu lintas dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa. Surat Edaran Kapolri juga mengatur prosedur penanganan atas terjadinya penggunaan handphone saat berkendara yang bisa menghilangkan nyawa, dan atau konflik sosial yang meluas.

Prosedur penanganannya oleh anggota Polri diatur dalam beberapa tahapan. *Pertama*, setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas . *Kedua*, personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana. *Ketiga*, setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan pelanggaran penggunaan handphone saat berkendara. Keempat, setiap personel Polri melaporkan ke pimpinan masing-masing terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke pelanggaran lalu lintas, setiap anggota Polri wajib melakukan berbagai tindakan preventif. Jika tindakan preventif sudah dilakukan, namun tidak menyelesaikan masalah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHPP, UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Jika SE Kapolri tersebut diletakkan dalam perspektif teoretis dalam hukum administrasi negara, produk hukum tersebut merupakan salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan (*policy rule*) atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *beleidsregel*. Dalam hukum administrasi negara, pejabat tata usaha negara (termasuk Kapolri) memang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum baik yang berupa peraturan (*regeling*), keputusan tata usaha negara (*beschikking*), maupun peraturan kebijaksanaan. Peraturan kebijaksanaan berbeda dengan sebuah undang-undang atau peraturan karena hanya mengikat secara internal kepada pejabat tata usaha negara sendiri dan tidak ditujukan untuk mengikat secara langsung kepada masyarakat.

Hal itu tentu berbeda dengan undang-undang atau peraturan yang memang harus dibuat mengikuti sistem hierarki peraturan perundang-undangan dan ditujukan untuk mengikat secara eksternal (masyarakat) maupun internal (aparatur pemerintah). Dengan demikian, kekuatan mengikat suatu peraturan kebijaksanaan kepada masyarakat seperti SE Kapolri tersebut sifatnya tidak langsung. Hal itulah yang menyebabkan suatu bentuk peraturan kebijaksanaan disebut sebagai suatu bentuk “hukum cermin” (*spiegel recht*) karena daya mengikatnya ibarat hanya



memantulkan norma kepada masyarakat karena dampak penggunaan peraturan kebijaksanaan itu oleh aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas operasionalnya yang mau tak mau juga akan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat yang bersentuhan dengan pelaksanaan tugas aparat pemerintah.

Berkaca pada landasan teoretis peraturan kebijaksanaan dalam sistem hukum administrasi negara seperti telah diuraikan di atas, sejatinya masyarakat tak perlu khawatir terhadap eksistensi SE Kapolri tersebut. Hal itu disebabkan suatu peraturan kebijaksanaan seperti SE Kapolri itu tak dapat membentuk norma hukum baru yang berimplikasi terhadap perilaku subjek hukum yang diatur. Pembentukan norma hukum baru di ranah perdata, tata negara, administratif, maupun pidana hanya dapat dilakukan melalui suatu undang-undang atau peraturan daerah. Varian lain dari peraturan kebijaksanaan yang selama ini dikenal dalam praktik administrasi negara adalah juklak, juknis, nota dinas, pengumuman, pedoman, dan sejenisnya. Semua jenis peraturan kebijaksanaan tersebut hanya merupakan sebuah alat komunikasi organisasi antarjabatan tata usaha negara dan di lingkungan internal pejabat tata usaha negara.

Meskipun suatu peraturan kebijaksanaan memang menjadi wewenang dan terletak di ranah kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara, termasuk Kapolri, dalam hukum administrasi negara memang dilekatkan pertanggungjawaban penggunaan wewenang tata usaha negara bagi setiap pejabat tata usaha negara yaitu tak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan yang berlaku dan tak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*the principles of good administration*).

Surat Edaran Kapolri sebagai salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan hanya dimaksudkan untuk menjamin ketaatasasan tindakan kepolisian dalam penanganan tindakan tersebut sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dari SE Kapolri tersebut. Polri tetap terikat untuk mematuhi berbagai prosedur hukum yang terdapat dalam norma hukum administrasi umum (UU Administrasi Pemerintahan) maupun norma hukum administrasi sektoral yang mengatur berbagai kategori tindakan yang dalam SE dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

Selain itu, Polri dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam SE Kapolri juga tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak penyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. Dengan SE Kapolri tersebut, seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan. Maka itu, pengawasan internal terhadap para pelaksana surat edaran tersebut harus berjalan paralel dengan kewenangan untuk melaksanakan surat edaran tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Tinjauan umum tentang ojek online

### 1. Ojek *online*

Ojek adalah transportasi umum yang menggunakan sepeda atau sepeda motor yang ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya. Transportasi adalah proses pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Jadi transportasi tidak hanya terfokus pada mesin saja, tetapi manusia juga bisa dikatakan sebagai indicator transportasi asalkan bisa memindahkan dari satu tempat ketempat yang lainnya. Transportasi *online* merupakan sebuah moda transportasi yang hampir sama dengan transportasi yang lainnya, hanya saja transportasi *online* dikendalikan oleh aplikasi berbasis *online*, sehingga pengguna atau konsumen bisa dengan mudah mengaksesnya. Ojek *online* menjadi pilihan saat ini karena dianggap lebih efektif dan efisien, pengguna tidak lagi capek menunggu taxi atau ojek pada tempat-tempat tertentu, cukup mengakses aplikasi ojek *online* yang ada pada smartphone, maka *driver* akan menjemput konsumen.<sup>36</sup>

Transportasi ojek *online* yang saat ini sangat terkenal dan saling berkompetisi secara ketat adalah Grab bike dan Gojek. Selain dua platform aplikasi ojek *online* tersebut, masih ada beberapa platform ojek *online* yang beroperasi di Indonesia seperti Uber, Nizu, Taksi Jeger, Blue Jek dan masih banyak lagi.

<sup>36</sup> Grab., dalam <https://www.grab.com/id/pressdownload/> diakses pada hari Minggu, tanggal 17 April 2020 pukul 16:25 WIB



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Grab

Grab merupakan nama salah satu provider atau penyedia layanan jasa dalam bidang transportasi berbasis *online*. Grab merupakan sebuah aplikasi yang didirikan oleh Anthony Tan dan Tan Hooi Ling yang bergerak pada sektor bisnis transportasi dan telah ada sejak Juni 2012.<sup>37</sup> Aplikasi tersebut memberikan inovasi baru terhadap transportasi di Indonesia, yaitu mengubah ojek konvensional menjadi ojek *online* yang kemudian dikenal dengan istilah Grab.

Grab merupakan perusahaan teknologi dengan misi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan mata pencaharian pekerja diberbagai sektor informal di Indonesia. Saat ini Grab telah beroperasi hampir diseluruh kota di Indonesia dari Aceh hingga Papua. Keberadaan Grab mendapat respon positif dari para pengemudi, sejak bergabung dengan perusahaan tersebut sebagai mitra mereka merasakan adanya peningkatan pendapatan dan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan melalui aplikasi yang telah disediakan.

Melihat keberhasilan ojek *online* dalam peningkatan kesejahteraan memang sangat disadari. Namun hal tersebut ternyata berdampak pada situasi yang lain, yaitu pertumbuhan laju volume kendaraan meningkat dengan pesat. Peningkatan volume kendaraan tersebut mengakibatkan kemacetan dan semakin kurangnya kehati-hatian masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan kurangnya kehati-hatian masyarakat dalam berkendara dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>37</sup> Grab., dalam <https://www.grab.com/id/pressdownload/> diakses pada hari Minggu, tanggal 17 April 2020 pukul 16:30 WIB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak hanya masyarakat umum, begitu juga pengemudi ojek *online* yang terlihat sering mengabaikan peraturan lalu lintas. Dalam menjalankan pekerjaannya, pengemudi Grab diharuskan untuk memantau *orderan* dari pelanggan melalui *smartphone* nya. Namun hal ini lah yang dapat membahayakan bagi pengemudi dan pengendara lain karena dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

### G. Kepolisian Dan Unit Lantas

#### 1. Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat. Kadangkala pranata ini bersifat militaristik, seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli. Namun selain polisi, ada pula lembaga polisi di luar POLRI yang tugasnya berbeda dengan polisi pada umum nya, di Indonesia terdapat beberapa lembaga kepolisian tertentu dengan berbagai

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karakteristik dan umumnya cakupan kerja nya lebih terbatas pada wilayah dan tugas tertentu, seperti :

- a) Polisi Pamong Praja (Pol PP), satuan dikomandoi seorang Mantri Polisi Pamong Praja (MP PP) setingkat di bawah camat (dulu disebut Asisten Wedana). MP PP dulu bertanggung-jawab kepada Wedana.
- b) Polisi Kehutanan Indonesia (Polhut), adalah polisi yang bernaung dibawah kementerian kehutanan, dibentuk sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas mengamankan, melindungi dan mengawasi hutan berikut ekosistemnya serta aktivitas yang berkaitan.
- c) Polisi Khusus Lembaga Pemasyarakatan (Polsuspas), adalah polisi dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas sebagai penjaga para narapidana di lembaga pemasyarakatan. Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), adalah polisi milik PT Kereta Api (PT KAI) yang bertugas menjaga kelancaran perjalanan kereta api dari gangguan keamanan dan lainnya. Sebelum membentuk Polsuska, PT KAI memakai jasa aparat Kepolisian untuk pengamanan perjalanan kereta api.

## 2. Unit lintas

Unit Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan

tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli,



pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk itu polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan bahasan Polri di masa depan (yang telah dibahas di atas).

Para petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menindaklanjuti kebijakan-kebijakan pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang SIM, STNK, BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan Undang-undang lainnya. Yang lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana kita dapat menjawab dan menjalankan amanah yang tertuang didalamnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2e dinyatakan :”bahwa tugas pokok

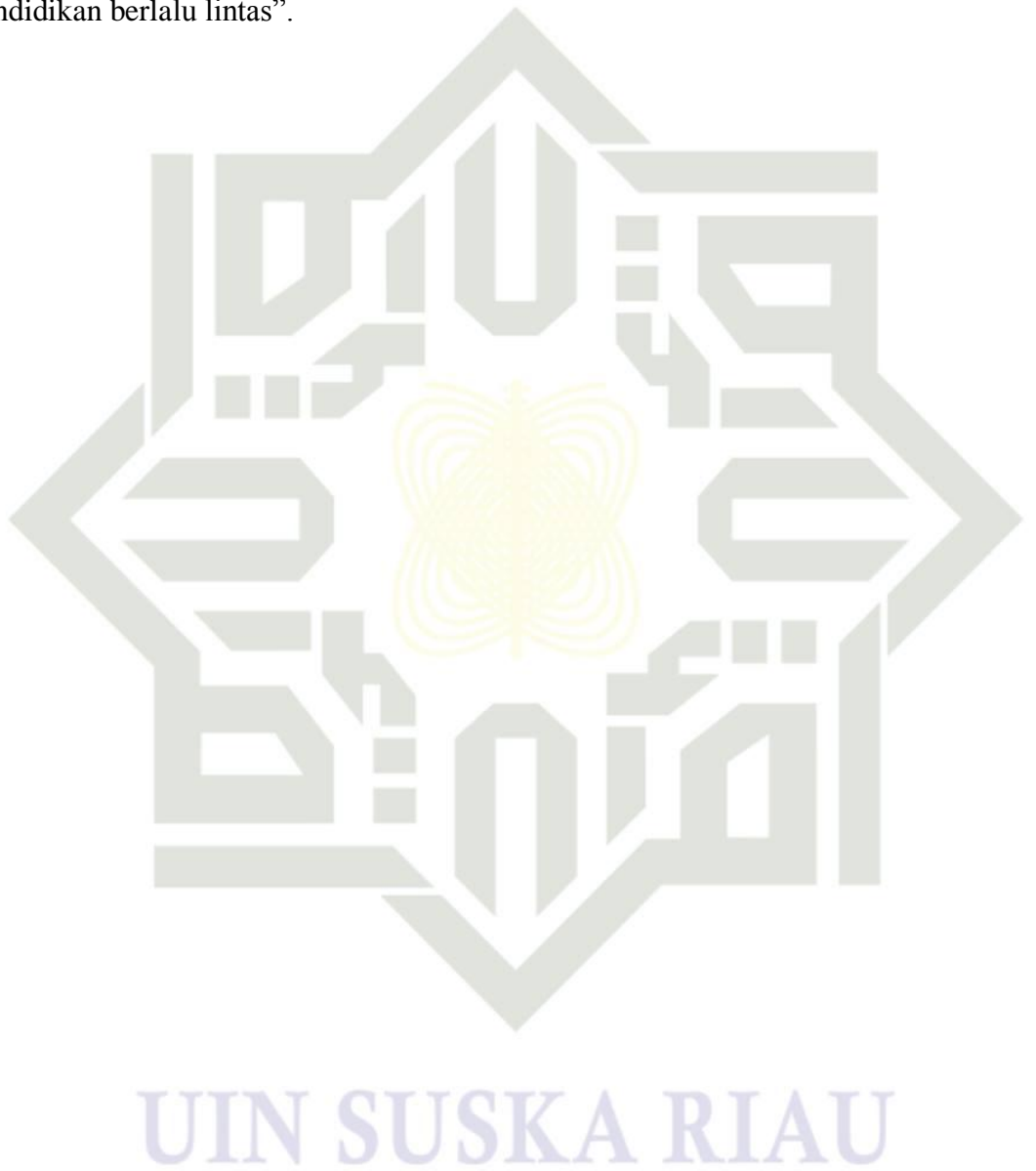
#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu : “urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas”.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum *driver* ojek *online* Grab di kecamatan tampan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tergolong masih rendah. Hal tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh *driver* Grab di kecamatan tampan ketika berkendara di jalan. Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh *driver* Grab di kecamatan tampan yaitu seperti menerobos lampu merah, tidak mengikuti petunjuk tentang cara berbelok, menggunakan ponsel ketika berkendara, memperbolehkan penumpang untuk tidak menggunakan helm dan memilih jalan tikus atau jalan dalam untuk menghindari petugas lalu lintas. Pelanggaran tersebut merupakan bentuk pelanggaran dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan sanksi dari pelanggaran tersebut sudah jelas tercantum dalam pasal-pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor yang mempengaruhi kurangnya Kesadaran hukum *driver* ojek *online* Grab di kecamatan tampan masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum ini disebabkan karena tidak terpenuhinya indikator-indikator kesadaran hukum dari segi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Dalam hal pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, para *driver* Grab di kecamatan tampan sebenarnya cukup mengetahui adanya aturan dari pemerintah yang khusus mengatur tentang tata cara berkendara di jalan dan memahami maksud dan tujuan aturan tersebut dibuat. Selain itu mereka juga mengetahui dan memahami apa saja yang boleh dan tidak boleh di langgar hingga sanksi yang diberikan sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap aturan tersebut. Sedangkan dalam hal sikap dan pola perilaku terhadap hukum, sebagian dari para *driver* Grab di kecamatan tampan mengaku melakukan pelanggaran lalu lintas ketika membawa ataupun tidak ataupun tidak membawa penumpang

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti selesaikan, maka diperoleh saran sebagai berikut :

1. Bagi *driver* ojek *online* Grab dan para pengguna jalan, hendaknya mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk ketaatan

warga negara terhadap peraturan yang ada. Sehingga tujuan negara untuk menciptakan keamanan dan kedamaian dapat terwujud demi kemaslahatan umum.

2. Bagi pihak kepolisian, sebagai bahan masukan kepada pihak kepolisian lalu lintas untuk meningkatkan pengawasan dan penegakkan terhadap para pelanggar aturan lalu lintas, serta sebagai bahan masukan untuk meningkatkan sosialisasi tentang kesadaran hukum terhadap aturan lalu lintas kepada pengguna jalan.
3. Bagi pihak Grab, diharapkan dengan adanya penelitian ini hendaknya pihak PT. Grab Indonesia ikut serta dalam memberikan sosialisasi kepada *driver* tentang pentingnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- Tamin, O.Z, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, (Bandung: ITB, 1997) dikutip dalam Yane Hairunnisa dan Rini Rachmawati, “Kajian Penyediaan Dan Pemanfaatan Pelayanan Trasnportasi Publik Di Kota Bekasi” *Jurnal Bumi Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012, Universitas Gadjah Mada.
- Endang Wahyusetyawati, “Dilema Pengaturan Transportasi *Online*”, *Jurnal Rechtsvinding Online*, 7 Mei 2017, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Zulfatun Ni'mah, “*Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*”, (Sleman, Yogyakarta:Teras,2012), Cet. I.
- Andi Zeinal Marala, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 5, Juli 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta Universitas Indonesia Press, 1986 ).
- Sumadi suryabrata, *metode penetitian* , (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2008)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) .
- Zainudin Ali , *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet. Ke 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) .
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *metode penelitian ekonomi islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2014.

Basal 106 ayat 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Badan Pusat Statistik kota pekanbaru, *pekanbaru dalam Angka 2019* (pekanbaru: BAPPEDA, 2008),

Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang Widya Karya, 2009)

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta , Rajawali

Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, (Jakarta : Era Swasta, 1984), hal 14

Soekanto Soerjono. *Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum* (.CV. Mandar Maju, Bandung. 1990)

Undang – undang lalu lintas dan angkutan jalan no 22 tahun 2009

## PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah Itu Aturan Lalu Lintas ?
2. Pelanggaran Apa Saja Yang Sering Terjadi Di Kecamatan Tampan Khususnya Yang Sering Dilakukan Oleh Driver Ojek Online (Grab) ?
3. Apa Saja Fungsi Dari Petugas Lalu Lintas Yang Ada Di Kecamatan Tampan ?
4. Apakah Driver Ojek Online (Grab) Masih Banyak Melanggar Lalu Lintas Seperti Menerobos Lampu Merah? Dan Apakah Ada Undang Undang Yang Mengatur Tentang Aturan Tersebut ?
5. Apa Faktor Yang Menyebabkan Kurangnya Kesadaran Hukum Driver Ojek Online (Grab) Dalam Berlalu Lintas
6. Apakah Pengetahuan Hukum Tentang Berlalu Lintas Itu ?
7. Apakah Driver Ojek Online Perlu Untuk Mengetahui Peraturan-Peraturan Tentang Lalu Lintas ?
8. Bagaimana Sikap Driver Ojek Online (Grab) Dalam Berlalu Lintas Yang Ada Di Kecamatan Tampan Ini ?

## ANGKET INSTRUMEN PENELITIAN

**Kesadaran Hukum *Driver* Ojek Online Dalam Berlalu Lintas**

**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

**Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

**( Studi Kasus Grab Bike Di Kecamatan Tampan )**

### IDENTITAS RESPONDEN

Nama :  
Jenis kelamin :  
Umur :  
Lama bekerja :

### PETUNJUK PENGISIAN :

Berilah jawaban YA/TIDAK sesuai dengan pilihan anda dengan cara memberikan tanda conteng pada kolom di bawah.

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah anda Mengetahui adanya peraturan dan perundang-undangan tentang berlalu lintas?		
2	Apakah anda pernah membaca aturan lalu lintas?		
3	Apakah anda mengetahui akibat yang terjadi bila anda mengabaikan aturan lalu lintas tersebut?		
4	Apakah anda mengetahui tentang larangan menggunakan handphone saat berkendara?		
5	Apakah anda pernah tidak menggunakan helm saat berkendara?		
6	Apakah anda pernah membawa penumpang melewati jalan dalam atau jalan tikus untuk menghindari aturan lalu lintas?		
7	Apakah anda pernah melawan arah jalan demi mempersingkat waktu anda dalam mengantar penumpang atau orderan ?		
8	Apakah anda memiliki surat – surat kendaraan yang lengkap ?		

1. Sanksi apa yang diberikan dari pihak manajemen Grab apabila *driver* tersebut melakukan pelanggaran?



Jawab : .....

.....

.....

Bagaimana jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena anda menggunakan ponsel saat berkendara? Apa yang akan anda lakukan?

Jawab : .....

.....

.....

.....

3. Bagaimana sikap anda terhadap aturan lalu lintas? Apakah anda mematuhi atau mengabaikannya?

Jawab : .....

.....

.....

.....

4. Bagaimana menurut anda dengan tingkat kesadaran hukum *driver* ojek *online* dalam berlalu lintas khususnya di kecamatan tampan?

Jawab : .....

.....

.....

.....

5. Apakah anda tau kenapa pemerintah membuat peraturan tentang berlalu lintas?

☐ Tahu

☐ Tidak tahu

Alasan. ....

.....

.....

.....

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "KESADARAN HUKUM *DRIVER OJEK ONLINE* DALAM BERLALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS GRAB BIKE DI KECAMATAN TAMPAN)" yang ditulis oleh :

Nama : NURHIDAYAT SAPUTRA  
NIM : 11327104266  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 29 Juni 2020  
Waktu : Jam, 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2020  
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua  
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris  
Roni Kurniawan, SH.,MH

Penguji 1  
Nurhidayat, SH., MH

Penguji 2  
Dr. Abu Samah, MH

Mengetahui,  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus S.Ag  
NIP. 197508012007011023

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

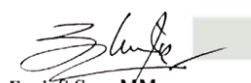
Proposal dengan judul **KESADARAN HUKUM DRIVER OJEK ONLINE DALAM BERLALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ( STUDI KASUS GRAB BIKE DI KECAMATAN TAMPAN )**

ditulis oleh saudara:

Nama : Nurhidayat Saputra  
NIM : 11327104266  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tanggal : Rabu, 16 Oktober 2019  
Narasumber : Jhoni Alizon. SH.MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Erni, S.Sos., MM**  
NIP. 19680226 199103 2 002

Pekanbaru, 23 Oktober 2019  
Narasumber

  
**Jhoni Alizon S.H., M.H**  
NIP.

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fashil.uin-suska.ac.id Email : fashil@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2391/2020  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 18 Maret 2020

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURHIDAYAT SAPUTRA  
NIM : 11327104266  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : XIV (Empat Belas)  
Lokasi : Kecamatan Tampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: Kesadaran hukum driver ojek online dalam berlalu lintas berdasarkan undang - undang  
nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ( studi kasus grab bike di  
kecamatan tampar )

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/1350



- a. Dasar :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  - Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/32198 tanggal 18 Maret 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- Nama : NURHIDAYAT SAPUTRA
- NIM : 11327104266
- Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
- Jurusan : ILMU HUKUM
- Jenjang : S1
- Alamat : JL. MAHA RAJA SRI WANGSA KEL. TUALANG KEC. TUALANG-SIAK
- Judul Penelitian : KESADARAN HUKUM DRIVER OJEK ONLINE DALAM BERLALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALUL LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS GRAB BIKE DI KECAMATAN TAMPAN)
- Lokasi Penelitian : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
- Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
- Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Juni 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru

Sekretaris

BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK

H. MAISISCO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19710514 199403 1 007

### Tembusan

- Yth :
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  - Yang Bersangkutan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/32198  
T E N T A N G



1.04.02.01

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/2391/2020 Tanggal 18 Maret 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

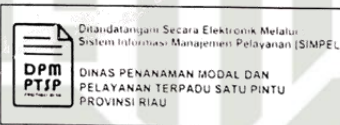
- Nama : NURHIDAYAT SAPUTRA
- NIM / KTP : 11327104266
- Program Studi : ILMU HUKUM
- Jenjang : S1
- Alamat : PEKANBARU
- Judul Penelitian : KESADARAN HUKUM DRIVER OJEK ONLINE DALAM BERLALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS GRAB BIKE DI KECAMATAN TAMPAN)
- Lokasi Penelitian :
  - DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU
  - POLSEK TAMPAN KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Dibuat di Pekanbaru  
Pada Tanggal 18 Maret 2020



#### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kustodian Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

### Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NURHIDAYAT SAPUTRA  
NIM : 11327104266  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul : KESADARAN HUKUM DRIVER OJEK ONLINE DALAM BERLALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ( STUDI KASUS GRAB BIKE DI KECAMATAN TAMPAN )  
Pembimbing : Firdaus SH,MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 22 Juli 2020  
An. Pimpinan Redaksi

Al. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL  
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU



## BIOGRAFI PENULIS

**Nurhidayat Saputra** , lahir di Perawang Kabupaten Siak pada tanggal 01 juli 1993 penulis lahir dari pasangan Bapak Nurmin dan Ibu Nurjas dan merupakan anak pertama dari empat bersaudara. pada tahun 1999 penulis masuk ke Sekolah Dasar Negeri 005 Tualang dan pada kelas V SD penulis di pindahkan Ke Sekolah Dasar Negeri 013 Tualang dan lulus pada tahun 2005.

Pada tahun 2005 penulis melanjutkan sekolah ke Smp 001 Tualang dan lulus pada tahun 2008.pada tahun 2009 penulis melanjutkan sekolah di Smk Yamatu (Yayasan Masyarakat Tualang ) dengan mengambil Jurusan Audio Video dan lulus pada tahun 2012 dan pada penulis melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah Dan Hukum dengan mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada semester VI penulis melakukan magang /praktek kerja lapangan di pengadilan tinggi pekanbaru selama 3 bulan,dan pada semester VII Penulis melakukan KKN ( kuliah kerja nyata ) di kelurahan bagan besar kecamatan bukit kapur kota dumai selama 5 bulan .

Dan pada tahun 2020 penulis berhasil menyelesaikan kuliah dengan ujian munaqasah yang dilakukan pada tanggal 29 juni 2020 .

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.